

DIFFICULTIES OF THE CURRICULUM 2013 IMPLEMENTATION IN ARABIC LANGUAGE AT MADRASAH IBTIDAIYAH

KESULITAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 MAPEL BAHASA ARAB PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

Nurul Hadi

IAIN Madura, Indonesia

nurulhadi@gmail.com

Abstract

This research revealed the difficulties of the implementation of the 2013 Curriculum (K-13), especially in Arabic subject in Islamic Elementary Schools/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) in Pamekasan, and the inhibiting factors. This study used qualitative research in the form of exploratory research, namely descriptive analysis. The population was all Islamic Elementary Schools (MI) in Pamekasan, and four schools were selected as samples by using purposive sampling technique.

The results showed that from the aspect of designing effective and meaningful learning, as well as in organizing learning, found that MI Islamiyah I Larangan Tokol, Tlanakan did not implement K-13 and did not have Arabic subject syllabus, and so did MI As-Salafi Sumber Duko Pakong. Even, the condition found in MIN 1 Konang, Galis as one of the State Islamic Elementary Schools in Pamekasan is almost the same as the Private Madrasah, because even though they have an Arabic subject syllabus, but it was still in print out syllabus, and the file is not formally legalized by the head of Madrasah. While, in the implementation of learning, it is revealed that teachers were not able to maximize the community, environment, media, and to utilize available internet connection in the learning practice. It happened in almost all Madrasah. Also, teachers of Madrasah Ibtidaiyah in Pamekasan need more training, guidance, and self-improvement in understanding the K-13 concept wholly and comprehensively. On the other hand, Madrasah Ibtidaiyah in Pamekasan did not yet maximize the K-13 concept in term of environmental empowerment as learning resources, and even it is undiscovered the use of andragogy approach, scientific approach, and active learning that should be applied in learning Arabic in Madrasah Ibtidaiyah in Pamekasan.

In general, there are three inhibiting factors which caused the difficulty in the implementation of K-13 in Madrasah Ibtidaiyah in Pamekasan; those include Madrasah and Government's Policy, lack of qualified teachers, and inadequate facilities. As for the impacts of the difficulty of K-13 implementation for the students can be divided into two aspects: (1) the learning process, and (2) the learning outputs.

Keywords: difficulties of the implementation of the Curriculum 2013; Arabic; Madrasah Ibtidaiyah; Pamekasan regency

Abstrak

Penelitian ini mengungkap kesulitan implementasi K-13 khususnya dalam mapel Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Pamekasan dan factor-faktor

yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan *qualitative research* dengan jenis penelitian eksploratif, yakni studi deskriptif analisis. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Madrasah Ibtidaiyah di Kabupate Pamekasan dengan empat sampel berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek perancangan pembelajaran efektif dan bermakna, serta dalam mengorganisasikan pembelajaran, ditemukan bahwa MI Islamiyah I Larangan Tokol kecamatan Tlanakan belum menggunakan K-13 dan tidak memiliki silabus Mapel Bahasa Arab, begitu juga MI As-Salafiyah Sumber Duko Pakong. Bahkan kondisi MIN 1 Konang Kecamatan Galis Pamekasan hampir sama dengan madrasah swasta, karena meskipun sudah mempunyai silabus tapi masih dalam bentuk file belum berupa *print out* formal yang disahkan oleh kepala madrasah. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pembelajaran ditemukan bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah dalam menerapkan pembelajaran bahasa Arab belum mampu mengoptimalkan masyarakat, lingkungan dan media termasuk juga penggunaan jejaring internet dalam praktik pembelajaran. Ini terjadi hampir di semua madrasah. Selain itu guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan perlu pembinaan dan peningkatan kualitas diri dalam memahami konsep K-13 secara utuh dan komprehensif. Di sisi lain madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan juga belum memaksimalkan konsep K-13 dalam mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar, bahkan belum ditemukan penggunaan pendekatan andragogik, saintifik, dan *active learning* yang semestinya diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan.

Secara umum ada tiga faktor penyebab kesulitan implementasi K-13 di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, yaitu: Kebijakan Madrasah dan Pemerintah, Keterbatasan Guru, dan Keterbatasan Fasilitas. Adapun dampak dari kesulitan implementasi K-13 kepada siswa, dapat dibedakan dalam dua aspek: (1) proses pembelajaran, dan (2) hasil belajar.

Kata Kunci: kesulitan implementasi K-13; *bahasa arab; madrasah ibtidaiyah; kabupaten Pamekasan*

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum dalam satuan pendidikan sudah menjadi sesuatu yang lazim. Perubahan itu bagian dari dinamisasi pendidikan, karena pendidikan mempunyai tuntutan untuk terus merespon dinamika social yang ada di sekelilingnya (فكري حسن ريان, t.t.).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini adalah bagian dari perubahan dinamika social, sehingga dunia pendidikan juga tidak dapat menghindarkan diri dari perkembangan teknologi tersebut (Mukminan, t.t.). Selain perkembangan teknologi, perubahan social juga semakin terasa dengan semakin merosotnya moral (dekadensi moral) yang semakin menjauhkan anak didik kita dengan hakikat tujuan pendidikan nasional (Rakyat, 1973).

Dari berbagai perubahan social itu, maka respon pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional mestinya tertuang dalam kurikulum. Karena kurikulum pendidikan adalah suatu perangkat system pendidikan yang secara koreprehensif menjadi perencana, system nilai, dan tolok ukur pendidikan itu sendiri (Oemar Hamalik, 2008).

Sebagaimana diungkapkan oleh Oliva (1982), kurikulum perlu memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan politik. Maka dari itu, Perubahan pada kurikulum madrasah juga menjadi suatu keniscayaan (PMA nomor 0912 Tahun 2014).

Kurikulum mata pelajaran yang seharusnya mencakup empat komponen dasar, yaitu tujuan pembelajaran, materi dan isi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta system evaluasi dalam pembelajaran (فكري حسن ريان, t.t.), pun seharusnya muncul dalam implementasi kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kurikulum 2013 (selanjutnya disingkat K-13) merupakan upaya (*ikhtiyar*) pemerintah untuk terus memperbaiki dunia pendidikan kita mesti disambut secara positif. Terlepas dari adanya banyak kekurangan dalam berbagai aspeknya, kurikulum 2013 memiliki konsep pendidikan yang integratif (Oemar Hamalik, 2008). Konsep itu terlihat misalnya dalam upaya menghilangkan dikotomi antar disiplin ilmu. Dengan artian masing-masing ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri untuk menciptakan peserta didik sebagai manusia yang utuh. Untuk mendidik anak pintar matematika bukan berarti anak hanya diajari teori dan rumus-rumus sedangkan asal-muasal angkanya tidak diajarkan. Teori matematika saja hanya akan mengantarkan seorang anak pintar menghitung, tetapi apabila sikap keagamaannya tidak diajarkan secara simultan bersamaan dengan rumus-rumus dan angka-angka itu, ketika dewasa kelak, anak didik kita hanya pandai bermain dengan angka meskipun asal muasal angka tersebut diperolehnya dengan cara yang tidak benar (korupsi misalnya).

Konsep ini (baca: K-13), terlepas dari lika-liku perjalanannya yang sedikit terganggu oleh proses politik, sudah empat tahun berjalan (KMA nomor 117 Tahun 2014). Padahal evaluasi kurikulum itu biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun demikian, implementasi kurikulum ini di tingkat satuan pendidikan masih tidak maksimal, bahkan ada sebagian madrasah yang belum menerapkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Bahasa Arab sama sekali (Observasi: 8-06-2017).

Lambatnya implementasi di beberapa madrasah ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak wajar, sebab dalam *planning* pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, mestinya mulai tahun pelajaran 2014-2015 semua madrasah sudah mulai melaksanakannya.

Selaku akademisi bidang Bahasa Arab, peneliti menjadi terganggu untuk meneliti lebih jauh fenomena yang tidak lazim ini. Hasil observasi mahasiswa di bawah arahan peneliti menunjukkan bahwa masih banyak Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan yang belum maksimal dalam implementasi K-13 untuk mata pelajaran (mapel) Bahasa Arab, bahkan ada yang belum sama sekali mengimplementasikannya.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengungkap factor-faktor apa saja sesungguhnya yang menjadi penghambat implementasi K-13 khususnya dalam mapel Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Pamekasan dan apa dampaknya bagi siswa dan pembelajaran Bahasa Arab.

Dengan demikian diharapkan perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan (sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Madura) ini dapat berperan aktif dalam memberikan tawaran dan langkah-langkah solutif untuk perbaikan pendidikan kita, khususnya madrasah-madrasah yang sama-sama berada di

bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Apalagi motto kemenag dalam hal ini adalah “Madrasah Lebih Baik, Lebih Baik Madrasah”. Maka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kemenag Republik Indonesia memiliki peran strategis untuk membantu terealisasinya motto tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini termasuk *qualitative research* (Lexy, 2002) karena data yang dikumpulkannya lebih banyak bersifat kualitatif bukan dalam bentuk angka. Sedangkan jenis penelitian ini adalah eksploratif, yakni studi deskriptif analisis (Arikunto, 2006; Suharsimi, 2006).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan. Tetapi yang diambil sebagai sampel hanya ada empat madrasah yang diambil berdasarkan teknik purposive sampling.

Menurut Sugiyono bahwa: “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” (Sugiono, 2000)

Agar sampel yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu kesulitan implementasi K-13 dalam mapel Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, maka ditentukan sesuai dengan teknik purposive, dimana ada madrasah ibtidaiyah kunci yang secara khusus berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah Objek Penelitian

Sebagai gambaran dari lokasi penelitian, perlu peneliti deskripsikan objek penelitian, yaitu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, dengan menampilkan profil singkat masing-masing.

Adapun objek dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*, artinya lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah sekolah/madrasah yang menurut data observasi sebelumnya tidak menerapkan kurikulum 2013 (K-13) atau baru saja menggunakan pada tahun terakhir (2017). Hal ini dimaksudkan agar, penelitian ini langsung mengenai sasaran yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu penggalan data lebih jauh tentang kesulitan Madrasah Ibtidaiyah dalam penerapan K-13 khusus mapel Bahasa Arab di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan keterwakilan lokasi (*local sampling*). Dalam hal ini, peneliti memandang perlu memilih keterwakilan tiga daerah di Pamekasan sebagai representasi dari daerah kabupaten Pamekasan, yaitu daerah utara, daerah tengah, dan daerah selatan. Daerah utara Pamekasan, diwakili oleh kecamatan Pakong (dari lima kecamatan yang ada: Pegantenan, Pakong, Waru, Batumarmar, dan Pasean), sedangkan daerah tengah diwakili oleh kecamatan Larangan

(dari empat kecamatan yang ada: Palengaan, Proppo, Kadur, dan Larangan) dan daerah selatan diwakili oleh kecamatan Tlanakan (dari empat kecamatan lainnya: Galis, Pademawu, Pamekasan, dan Tlanakan). Dari masing-masing kecamatan tersebut, peneliti memilih minimal satu madrasah sebagai objek penelitian.

Dari kecamatan Pakong, peneliti memilih Madrasah Ibtidaiyah (MI) As-Salafiyah Sumber Duko Pakong. Sekolah ini berada dalam lokasi pondok pesantren As-Salafiyah Sumber Duko Pakong.

Sementara dari kecamatan Larangan, objek penelitian ini adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Djufri yang terletak di Dusun Aeng Penai Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan untuk kecamatan Tlanakan, madrasah yang menjadi objek penelitian adalah Madrasah Islamiyah 1 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Dan untuk mengimbangi data, peneliti juga mengambil sampel dari sekolah negeri. Dalam hal ini, peneliti memilih Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Pamekasan yang terletak di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Di samping karena alasan keterwakilan sebagai sekolah negeri di mana hanya ada dua madrasah Ibtidaiyah negeri di kabupaten Pamekasan, sekolah ini juga dianggap representatif karena letak geografisnya yang berada di sisi timur kabupaten Pamekasan.

B. Implementasi K-13 di Lokasi Penelitian

Untuk melihat bagaimana implementasi K-13 di lokasi penelitian, peneliti menggunakan teori implementasi kurikulum 2013 yang dijabarkan oleh Mulyasa dalam bukunya “Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013”. Dengan teori ini, implementasi tidak bisa sekadar klaim yang disampaikan oleh pihak sekolah bahwa sekolahnya telah menerapkan K-13 untuk semua mata pelajaran yang diajarkan di lembaganya, padahal dalam realitasnya lembaga tersebut sesungguhnya belum mengimplementasikan K-13 seutuhnya.

Oleh karena itu, Mulyasa melihat implementasi kurikulum 2013 secara komprehensif harus memenuhi empat aspek berikut (Mulyasa, 2014): (1) bagaimana sekolah merancang pembelajaran efektif dan bermakna, serta dalam mengorganisasikan pembelajaran, (2) bagaimana sekolah memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran, (3) bagaimana sekolah melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter, dan terakhir (4) bagaimana penataan penilaian (evaluasi).

Maka, sekolah dapat dikatakan telah melaksanakan kurikulum 2013 (K-13) manakala telah mengimplementasikan keempat aspek tersebut secara berkelindan dan konsisten.

Jadi sesungguhnya sekolah manapun yang mengaku telah menerapkan K-13 dalam mata pelajaran Bahasa Arab misalnya, tidak serta merta menjadi bukti yang otentik bahwa sekolah tersebut telah benar-benar menerapkan K-13 tersebut secara komprehensif.

Dan untuk mengetahui implementasi K-13 di Madrasah Ibtidaiyah pada mata pelajaran (Mapel) Bahasa Arab di Kabupaten Pamekasan, mari kita lihat data berikut:

1. Merancang Pembelajaran Efektif dan Bermakna

Dalam hal ini, rupanya semua sekolah yang menjadi objek penelitian ini belum memiliki rancang bangun mapel Bahasa Arab yang dibuat sendiri oleh madrasah. Bahkan

MI Islamiyah I Larangan Tokol kecamatan Tlanakan misalnya mengaku belum menggunakan K-13 dan tidak memiliki silabus Mapel Bahasa Arab, berikut pengakuan guru Bahasa Arab di sana (wawancara: 28 Maret 2018):

“Kami menggunakan KTSP dan masih belum ada Silabus khusus Bahasa Arab. Namun tidak ada masalah hanya saja untuk sementara Silabus tidak dipakai dan lebih kepada praktek dan semuanya terkonsep meskipun tidak ada silabus.”

Madrasah ini bukan hanya tidak menerapkan K-13 dalam mapel Bahasa Arab, tetapi juga tidak memiliki silabus dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak didiknya. Sehingga pembelajaran bahasa Arab berjalan tanpa arah dan tidak ada target yang jelas.

Kondisi yang sama dialami oleh MI As-Salafiyah Sumber Duko Pakong, dimana madrasah ini mengaku tidak memiliki silabus dan tidak menerapkan K-13 dalam mapel Bahasa Arab karena menganggap “percuma” menggunakan K-13, mereka menganggap bahwa K-13 sama saja dengan KTSP. Berikut pernyataan guru Bahasa Arab di sana (Wawancara: 21 Maret 2018): “Jika menggunakan kurikulum 2013 percuma kalau tidak ada bukunya”. Jadi, madrasah ini bukan hanya tidak memahami filosofi K-13 yang berbeda dengan KTSP, bahkan silabus pun mereka tidak memiliki.

Ternyata apa yang terjadi pada madrasah swasta tidak jauh berbeda dengan yang ada di madrasah negeri. MIN 1 Konang Kecamatan Galis Pamekasan misalnya mengaku baru menerapkan K-13 sejak tahun 2017 (wawancara: 7 april 2018), artinya ada keterlambatan proses implementasi K-13 selama tiga tahun dari yang semestinya (tahun 2014). Meskipun madrasah plat merah ini mengaku telah memiliki silabus tetapi sampai saat ini belum dicetak (*print out*). Itu artinya, Madrasah negeri ini kurang serius dalam menyiapkan perangkat K-13. Berikut pernyataan guru bahasa Arab MIN 1 Konang: “Kurikulum yang dipakai di MIN Konang saat ini mulai dari kelas I-IV adalah Kurikulum 2013 sejak tahun 2017 sedangkan silabus dan RPP sudah ada namun untuk saat ini belum di- *print out*, masih berbentuk file”.

Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di MI Al-Djufri Blumbungan Kecamatan Larangan. Kurikulum yang dipakai madrasah ini sudah menggunakan K-13 dan sudah memiliki silabus (wawancara: 28 maret 2018). Ini tentu saja merupakan realitas yang sedikit lebih baik.

Setelah mengetahui realitas madrasah ibtidaiyah di kabupaten Pamekasan dalam implementasi kurikulum 2013 mapel Bahasa Arab khususnya bidang perencanaan tujuan, indikator, materi dan strategi yang tertuang dalam bentuk silabus dan RPP, sekarang mari kita lihat bidang pengorganisasian pembelajarannya.

2. Mengorganisasikan Pembelajaran

Dari aspek pengorganisasian pembelajaran, implementasi K-13 pada Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Pamekasan ini dapat dilihat dari empat kegiatan (Mulyasa, 2014): (1) pelaksanaan pembelajaran; (2) pengadaan dan pembinaan tenaga ahli; (3) pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar; dan (4) pengembangan kebijakan belajar.

a) Pelaksanaan Pembelajaran

Realitas di lapangan belum menggambarkan pola pikir tersebut. Pola pikir K-13 yang dibangun di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan masih setengah hati.

Pegangan utama guru Madrasah Ibtidaiyah dalam menerapkan pembelajaran bahasa Arab masih terfokus pada beberapa poin saja, terutama poin pertama saja, yaitu “pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik”. Tetapi dalam praktiknya, pola pikir ini justru mengakibatkan peserta didik terbengkalai karena sering ditinggalkan oleh gurunya (observasi dan wawancara). Padahal, dalam pengembangan pola pikir yang utuh, peserta didik diposisikan sebagai pelanggan (*users*), artinya peserta didik tetap dilayani dengan baik secara optimal bukan dibiarkan belajar sendiri tanpa adanya pelayanan yang prima.

Di sisi lain, banyak madrasah Ibtidaiyah yang belum mampu mengoptimalkan masyarakat, lingkungan dan media termasuk juga penggunaan jejaring internet dalam praktik pembelajaran. Ini terjadi hampir di semua madrasah (observasi), alasan yang diungkapkan oleh sekolah selalu sama “keterbatasan fasilitas dan dana” (wawancara: 7 maret 2018).

Memang tidak bisa disangkal, fasilitas sekolah terutama yang berhubungan dengan media pembelajaran sangat terbatas, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki buku pegangan bahasa Arab yang diterbitkan oleh pemerintah sebagaimana peneliti temukan di Madrasah Ibtidaiyah As-Salafiyah Sumberduko Pakong dan MI Islamiyah 1 Larangan Tokol Tlanakan, alih-alih fasilitas media elektronik berbasis IT. Namun begitu, ketika peneliti memperhatikan guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah ternyata sudah memiliki *handphone* (HP) berbasis internet, bahkan tidak jarang peserta didik yang juga memegang alat teknologi komunikasi canggih tersebut. Kalau demikian, menurut hemat peneliti masalah sesungguhnya bukan terletak pada “keterbatasan fasilitas dan dana” seperti apa yang mereka sampaikan, tetapi lebih kepada faktor pembinaan dan peningkatan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran.

b) Pengadaan dan Pembinaan Guru Bahasa Arab

Dalam pengamatan peneliti, kualitas guru Bahasa Arab di madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan masih belum bisa menjalankan konsep K-13 dalam pembelajaran Bahasa Arab secara komprehensif. Hal itu terlihat dari cara pandang mereka terhadap K-13 itu sendiri. Ada yang menganggap bahwa dalam K-13 guru hanya berperan sebagai pengarah saja. Ini diungkapkan oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Djufri Blumungan Pamekasan yang sudah menerapkan K-13 dengan mengatakan (wawancara: 28 maret 2018): “dalam pembelajaran bahasa Arab K-13 yang berperan aktif siswa, guru hanya mengarahkan”. Bahkan ada guru yang menganggap percuma menggunakan K-13 atau tidak ada bedanya dengan KTSP yang telah diterapkan sebelumnya, sebagaimana telah peneliti sampaikan di atas.

c) Pendayagunaan Lingkungan sebagai Sumber Belajar

Dalam implementasi K-13 di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, peneliti belum menemukan contoh konkret madrasah yang mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Rata-rata madrasah hanya bertumpu pada buku sebagai satu-satunya sumber belajar dalam bahasa Arab. Ini peneliti temukan di Madrasah As-Salafiyah Pakong, MI Islamiyah I Larangan Tokol, MIN 1 Pamekasan, dan MI Al-Djufri Blumungan. Guru MIN 1 Pamekasan mengatakan (wawancara: 7 april 2018): “Materi yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah ini bersumber dari Buku ajar yang sudah tersedia”. Sedangkan guru MI Islamiyah I Tlanakan mengatakan bahwa “acuan materi bahasa arab

yang diajarkan bersumber dari Buku panduan KTSP, Metode-metode praktis tata cara belajar baca kitab, Bahasa Arab MD (Madrasah Diniyah)” (wawancara: 28 maret 2018).

Dengan demikian, pengembangan kurikulum 2013 yang mengarahkan pada perubahan pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya) tidak terjadi di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan.

Padahal proses pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar memungkinkan siswa menemukan hubungan yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata, konsep dipahami melalui proses penemuan, pemberdayaan dan hubungan (Depdiknas, 1990). Oleh karena itu, pembelajaran melalui lingkungan merupakan strategi dan konsep yang cocok dan pas untuk setiap proses pembelajaran (Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, 2013).

d) Pengembangan Kebijakan Belajar

Implementasi K-13 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Kebijakan yang jelas dan baik akan dapat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam implementasi pembelajaran berbasis kompetensi. Selain kepala sekolah, di Kabupaten Pamekasan, rupanya juga ada peran KKM (Kelompok Kerja Madrasah) dalam memberikan kebijakan pendidikan di madrasah. Kebijakan strategis dalam pendidikan madrasah banyak diputuskan dalam KKM ini. Peneliti juga menemukan bahwa madrasah yang tidak menggunakan K-13 ternyata sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh KKM. Pernyataan ini disampaikan oleh Madrasah Ibtidaiyah As-Salafiyah Sumber Dukong Pakong (wawancara: 21 maret 2018).

Dengan demikian, untuk mendukung pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan ada beberapa stake holders yang sangat berperan, di antaranya kepala Madrasah, KKM (Kelompok Kerja Madrasah), dan Kementrian Agama Kabupaten yang dimotori oleh seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kabupaten Pamekasan.

3. Memilih dan Menentukan Pendekatan Pembelajaran

Aspek ketiga yang sangat berperan penting dalam mendukung implementasi K-13 adalah memilih dan menentukan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini Mulyasa menawarkan empat model pendekatan dalam pembelajaran yang cocok pada K-13 untuk semua mata pelajaran, terutama bidang bahasa Arab, yaitu:

- a. Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)
- b. Bermain Peran (*Role Playing*)
- c. Belajar Tuntas (*Mastery Learning*)
- d. Pembelajaran Partisipatif

Keempat pendekatan ini tentu saja masih bisa diperkuat lagi dengan pendekatan-pendekatan lain dalam pembelajaran. Tetapi pada prinsipnya, keempat pendekatan ini sudah sangat cukup, apalagi masih diperkaya dengan berbagai varian metode dan teknik pembelajaran masing-masing pendekatan. Karena masing-masing pendekatan itu mestinya mempunyai banyak variasi metode dan teknik dalam pembelajaran. Kalau begitu, dengan empat macam pendekatan ini saja, tentunya akan menghasilkan banyak sekali variasi metode dan teknik dalam pembelajaran bahasa Arab. Pemilihan metode pembelajaran itu bergantung kepada materi apa yang akan diajarkan.

Oleh karena itu, pemilihan pendekatan ini sangat bergantung kepada silabus yang dimiliki madrasah, dari sanalah pemilihan pendekatan yang paling efektif dapat ditentukan. Karena memang tidak ada pendekatan atau metode pembelajaran yang paling ideal, sebab yang menentukan metode tersebut baik atau tidaknya terletak pada sejauh mana efektifitas metode tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Namun begitu, Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan yang menjadi objek penelitian ini masih belum bisa mengembangkan pembelajaran bahasa Arab dengan berbagai pendekatan di atas. Sebut saja MIN 1 Pamekasan hanya menggunakan teknik bermain dan metode ceramah, sementara MI Al-Djufri hanya menggunakan Metode diskusi, dan MI Islamiyah 1 hanya menggunakan metode tanya-jawab dan teknik menghafal (wawancara).

Metode-metode yang diungkapkan oleh guru-guru madrasah ibtidaiyah ini menggambarkan betapa miskinnya mereka dalam hal pendekatan pembelajaran bahasa Arab, bahkan beberapa metode yang dipakai, seperti metode ceramah dan diskusi, sesungguhnya tidak relevan dalam pembelajaran bahasa. Metode ceramah dan diskusi mungkin cocok untuk mapel lain, seperti fiqih, akidah, hadis atau lainnya, tetapi untuk pembelajaran bahasa Arab metode ini tidak relevan. Ini menjadi bukti lain, bahwa ketersediaan guru-guru yang baik dan profesional dalam mengajarkan bahasa Arab di tingkat madrasah ibtidaiyah khususnya di Kabupaten Pamekasan masih sangat kurang memadai.

4. Melaksanakan Pembelajaran, Pembentukan Kompetensi, dan Karakter

Pelaksanaan pembelajaran dalam K-13 biasanya menggunakan pendekatan saintifik. Artinya semua mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik apapun metode yang dipakai harus melalui tahapan 5M. Menurut Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, 5M dalam proses pembelajaran K-13 terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi/eksperimen; (4) mengasosiasikan/mengolah informasi; dan (5) mengkomunikasikan. ("Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013," t.t.)

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan banyak ragam dan bentuknya. Meskipun demikian, tidak semua tahapan ini cocok untuk mata pelajaran bahasa Arab. Karena pada dasarnya pendekatan saintifik ini diperuntukkan untuk mapel ilmu-ilmu eksakta. Akan tetapi mapel bahasa Arab juga bisa mengembangkan pendekatan ini secara natural tanpa harus memaksakan sesuatu yang tidak pas, sehingga tidak semua tahapan 5M ini harus berjalan secara tertib atau harus terlaksana secara keseluruhan karena tidak ditemukan relevansinya dalam pembelajaran bahasa Arab.

Dalam tahapan pertama 5M, guru bahasa Arab dapat memperdengarkan kaset, atau video atau drama atau dibawa ke lokasi tertentu disesuaikan dengan tema yang akan dipelajari. Kegiatan tersebut sebagai langkah awal untuk bisa diamati oleh peserta didiknya. Kalau memang terpaksa karena keterbatasan media atau lainnya, maka guru sesungguhnya bisa memulai pembelajaran dengan cerita yang dapat disimak dan diperhatikan oleh peserta didiknya. Langkah ini merupakan tahap mengamati bagi peserta didik.

Lalu mari kita lihat praktik pembelajaran di madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, ternyata pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan pola pikir lama bahwa pembelajaran itu sama dengan transfer ilmu. Kegiatan “mengamati” sebagai pembuka wacana dari rasa ingin tahu peserta didik justru tidak ditemukan. Kegiatan “menanya” yang terjadi bukan karena bertanya dari apa yang mereka lihat, dengarkan atau rasakan dari fenomena yang diperlihatkan atau diperdengarkan, tetapi bertanya dari apa yang mereka tidak mengerti. Paparan guru yang monoton membuat anak didik tidak mengerti, maka pertanyaan mereka adalah pertanyaan atas ketidakfahaman mereka akan materi yang disampaikan oleh gurunya (observasi).

5. Penataan Penilaian

Salah satu aspek yang dijadikan ajang perubahan dan penataan kaitannya dengan implementasi K-13 adalah penataan standar penilaian. Penataan tersebut terutama disesuaikan dengan penataan yang dilakukan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses. Meskipun demikian, pada akhirnya penataan penilaian tersebut tetap bermuara dan berfokus pada pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan inti dari implementasi Kurikulum.

Implementasi K-13 yang sarat dengan kompetensi dan karakter, hendaknya disertai dengan penilaian secara utuh, terus menerus, dan berkesinambungan, agar dapat mengungkap berbagai aspek yang diperlukan dalam mengambil suatu keputusan.

Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. Untuk kepentingan tersebut, pelaksanaan penilaian perlu membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar. (Mulyasa, 2014)

Pada aspek ini, Mulyasa mengajukan tiga model penilaian, yaitu:

a) Penilaian Unjuk Kerja

Dalam penilaian unjuk kerja, Leighbody mengemukakan elemen-elemen kinerja yang dapat diukur adalah: (1) kualitas penyelesaian pekerjaan, (2) keterampilan menggunakan alat-alat, (3) kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai, (4) kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi informasi yang diberikan, dan (5) kemampuan membaca, menggunakan diagram, gambar-gambar, dan simbol-simbol.

b) Penilaian Karakter

Penilaian karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikuti. Pembentukan karakter memang tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat, tapi indikator perilaku dapat dideteksi secara dini oleh setiap pendidik.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penilaian yang dilakukan harus mampu mengukur karakter yang harus diukur. Lebih dari itu, hasil penilaian harus dapat digunakan untuk memprediksi karakter peserta didik, terutama dalam penyelesaian pendidikan, dan kehidupan di masyarakat kelak.

c) Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap seluruh tugas yang dikerjakan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian portofolio dapat dilakukan bersama-sama oleh pendidik dan peserta didik, kemudian menentukan hasil penilaian atau skor.

Penilaian portofolio dalam K-13 harus dilakukan secara utuh dan berkesinambungan, serta mencakup seluruh kompetensi inti yang dikembangkan.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa tugas yang diberikan harus mampu meningkatkan hasrat belajar peserta didik, dan membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi.

Lalu bagaimana realitas sistem evaluasi dan penataan penilaian di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan? MIN 1 Pamekasan menggunakan sistem evaluasi gaya lama, “seperti Tanya-jawab, menjawab soal-soal di buku teks baik secara tulisan dan lisan” (wawancara: 7 april 2018). Sedangkan di MI Islamiyah 1 Larangan Tokol lebih sederhana lagi, yaitu “Praktek baca tulis dan praktek dalam muhadrasah (untuk kelas 1 dan 2)”. Sementara di MI Al-Djufri Blumbungan dicukupkan dengan dengan UTS (Ujian Tengah Semester dan UAS (Ujian Akhir Semester)”. (wawancara: 28 maret 2018)

Realitas ini, menunjukkan bahwa sistem evaluasi di semua madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan masih belum sepenuhnya mengikuti pola pikir K-13. Semua madrasah tersebut belum memunculkan sistem evaluasi dalam krakter. Padahal penilaian karakter ini merupakan tujuan yang sangat prinsip dalam K-13. Makanya dalam klasifikasi kompetensi inti (disingkat KI) dalam K-13 disebutkan bahwa KI-1 adalah sikap religius dan KI-2 sikap social (“PMA Nomor 0912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013,” t.t.). Dari KI-1 dan KI-2 inilah maka pembinaan karakter dan penilaiannya harus diutamakan.

Tetapi, anehnya dari dokumentasi buku raport yang dimiliki madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan yang didapatkan peneliti, semuanya sudah menggunakan format buku Rapor model K13. Itu artinya, ada penilaian karakter yang dilakukan oleh guru tetapi hanya dilakukan secara spekulatif tanpa ada penilaian terformat secara terus menerus dari keseharian peserta didiknya.

6. Menetapkan Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan implementasi K-13 dalam pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruh atau setidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan.

Realitas di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, penetapan kriteria keberhasilan pada setiap mata pelajaran ini sudah ditetapkan. Istilah yang dipakai adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Dokumentasi Rapor Siswa). Dengan menetapkan KKM sebesar 75% berarti siswa dianggap lulus dalam mata pelajaran tersebut apabila nilainya telah mencapai 7.5 dalam bentuk puluhan atau 75 dalam bentuk ratusan. Ketika peserta didik tidak mencapai nilai KKM yang sudah ditetapkan, maka siswa tersebut harus mengulang atau mengikuti remidi pada waktu yang sudah ditentukan (wawancara).

Sampai pada poin penetapan KKM ini atau penetapan penilaian dari sisi proses pembelajaran, peneliti melihat hampir seluruh siswa di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan telah mencapainya. Hal itu dibuktikan dengan nilai raport yang diperoleh masing-masing. Namun, ketika dilihat dari sisi hasil, yakni perubahan perilaku peserta didik, dalam hal ini kemampuan dalam berbahasa Arab masih sangat minim, terutama dalam kemahiran berbicara. Pengetahuan bahasa Arab siswa madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan lebih banyak pada tataran penguasaan kosa kata bahasa Arab dengan teknik menghafal.

C. Kesulitan Implementasi K-13 di Lokasi Penelitian

Dari paparan di atas, ada beberapa faktor penyebab kesulitan implementasi K-13 di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Secara umum ada tiga faktor yang menjadikan implementasi K-13 tidak terlaksana secara optimal di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1. Kebijakan Madrasah dan Pemerintah

Ini adalah faktor yang paling utama apakah K-13 akan diterapkan atau tidak. Kebijakan kepala madrasah menjadi garis penentu pertama diberlakukan atau tidak, urusan lain-lain akan menyusul di belakang. Hal itu senada dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi: “Hukmu al-Hakim yarfa’u al-khilaf” (ketentuan penguasa akan menghilangkan keraguan dan perbedaan pendapat).

Oleh karenanya, keberadaan madrasah-madrasah yang sampai saat ini belum menerapkan K-13 dalam mapel Bahasa Arab, seperti MI As-Salafiyah Sumber Duko Pakong, MI Islamiyah Larangan Tokol Tlanakan dan madrasah lainnya, faktor utamanya pasti bersumber dari kebijakan kepala madrasah yang tidak tegas.

Selain kepala madrasah, rupanya ada faktor lain yang ditemukan peneliti di MI As-Salafiyah Pakong, yaitu keputusan KKM (Kelompok Kerja Madrasah). Pihak MI As Salafiyah mengaku bahwa madrasahnya tidak menggunakan K-13 dalam mapel Bahasa Arab karena mengikuti ketentuan KKM (wawancara: 21 maret 2018).

Karena KKM ini adalah kelompok kerja madrasah yang dibentuk oleh pemerintah setempat, dalam hal ini seksi pendidikan madrasah (Pendma) pada Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, maka kebijakan yang sangat berpengaruh kepada madrasah sesungguhnya adalah kebijakan pemerintah (Pendma).

Maka, implementasi K-13 yang terjadi di madrasah ibtidaiyah Kabupaten Pamekasan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Arahan dan binaan pemerintah kabupaten, yang dalam hal ini diwakili oleh Penma Kemenag Kabupaten, dalam rangka menyukseskan PMA Nomor 0912 Tahun 2013 sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi K-13 di madrasah-madrasah.

Namun demikian, mengenai kebijakan pemerintah ini, pemerintah kabupaten (Pendma) tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kesimpang-siuran kebijakan implementasi K-13 ini juga dipengaruhi oleh faktor pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Di mana sempat beredar kebijakan pemberhentian sementara implementasi K-13 oleh Mendikbud Anis Baswedan (2014). Inilah sesungguhnya pangkal kebingungan madrasah-madrasah dalam menentukan kurikulum apa yang akan dipakai. Sehingga tidak mengherankan, madrasah negeri seperti

MIN 1 Pamekasan saja misalnya, masih baru memberlakukan K-13 pada tahun 2017, tiga tahun setelah kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah.

2. Keterbatasan Guru

Faktor kedua dari kesulitan implementasi K-13 di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan ini adalah faktor guru. Dari uraian data-data di atas, nampak sekali bahwa guru-guru Bahasa Arab masih belum memahami betul apa itu K-13 secara konseptual. Banyak guru hanya memahami K-13 secara parsial; tidak komprehensif. Perubahan kurikulum menurut kebanyakan guru, difahami hanya sekadar perubahan yang bersifat administratif, seperti perubahan rapor atau format penilaian, perubahan format silabus dan RPP, bahkan parahnya lagi ada juga guru yang memahami perubahan K-13 merupakan perubahan tanggung jawab, yaitu tugas belajar tidak lagi menjadi tanggung jawab guru tetapi sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab siswa. Akibatnya, atas nama K-13, kadang peserta didik dibiarkan oleh gurunya di dalam kelas untuk belajar sendiri sementara gurunya ke kantor untuk aktivitas yang lain.

Keterbatasan guru dalam memahami konsep K-13 ini, dalam hemat peneliti, disebabkan oleh beberapa faktor: (1) sosialisasi kebijakan; (2) latar belakang pendidikan; dan (3) kesejahteraan guru.

a) Sosialisasi Kebijakan

Untuk memahami konsep K-13 secara komprehensif diperlukan workshop atau FGD (*Focus Group Discussion*) kepada guru secara intensif. Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi dari perubahan kurikulum dari KTSP ke K-13. Model FGD atau Workshop K-13 ini seyogyanya berdasarkan kelompok guru mata pelajaran semacam MGMP (*Musyawah Guru Mata Pelajaran*). Dalam FGD yang terstruktur inilah, guru-guru diberikan pemahaman secara konseptual, mulai dari filosofi perubahan, rancangan pembelajaran bermakna, pemilihan pendekatan, pembentukan kompetensi dan karakter sampai dengan sistem evaluasi. Untuk memahami materi seperti ini, tentu tidak cukup hanya model seminar dengan sekali tatap muka. Model sosialisasinya harus berupa workshop yang berkesinambungan.

Sayangnya, realitas guru madrasah ibtidaiyah di kabupaten Pamekasan tidak mendapatkan model sosialisasi K-13 yang utuh. Sehingga tidak heran apabila pemahaman mereka terhadap implementasi K-13 juga parsial. Maka yang terjadi, implementasi K-13 mendapatkan respon yang kurang mengembirakan.

Jawaban guru-guru bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan pada waktu diwawancarai tentang proses pembelajaran, pemilihan pendekatan dalam pembelajaran, dan tentang sistem evaluasi yang dipraktikkan di madrasahny masing-masing, masih jauh panggang dari api. Begitu juga, ketika diobservasi dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas masih menggunakan gaya lama dan belum ada peningkatan pola pikir sebagaimana digariskan dalam konsep K-13.

b) Latar Belakang Pendidikan

Faktor lain yang menjadi keterbatasan guru bahasa Arab madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan dalam memahami konsep K-13 adalah latar belakang pendidikan guru bahasa Arab yang mengajar di madrasah ibtidaiyah rata-rata bukan sarjana Pendidikan Bahasa Arab. Ini merupakan fakta lain yang menjadi faktor kesulitan implementasi K-13 pada mapel Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Dari empat objek penelitian ini, tidak ada satupun guru bahasa Arab yang berlatar belakang sarjana PBA.

Maka tidak mengherankan ketika metode yang dipakai dalam mengajar bahasa Arab masih menggunakan ceramah atau diskusi, itu barangkali karena latar belakang pendidikan Pendidikan Agama Islam (PAI). Selain itu, di tingkat madrasah ibtidaiyah tidak dikenal guru mata pelajaran, yang ada adalah guru kelas. Seorang guru pada jenjang madrasah ibtidaiyah harus dapat mengajarkan semua mata pelajaran termasuk di dalamnya bahasa Arab, maka kebanyakan guru kelas ini berlatar belakang PGSD/PGMI (Pendidikan Guru SD/Pendidikan Guru MI).

c) Kesejahteraan Guru

Ini adalah faktor lawas tapi prinsipil. Keterbatasan guru dalam implementasi K-13 secara optimal dan komprehensif erat hubungannya dengan kesejahteraan guru tersebut, terlebih lagi bagi guru-guru non-pns. Sebab, guru mendapatkan penghasilan yang jauh dari standar cukup, alih-alih mau sejahtera. Sehingga idealisme konseptual K-13 menjadi tidak begitu diperhatikan secara serius, karena mereka masih sibuk mencari penghasilan lain sehabis mengajar. Sedangkan pembelajaran K-13 harus diprencanakan dan dipersiapkan sedemikian rupa, ada juga tambahan perangkat administratif yang juga seharusnya dikerjakan oleh guru dalam implementasi K-13.

Kesejahteraan guru swasta memang sangat memprihatinkan, honor mereka hanya mengandalkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah. Padahal dana BOS yang boleh digunakan untuk honor guru tidak lebih dari 50% saja. Di sisi lain, besaran nominal BOS itu ditentukan oleh jumlah siswa yang dimiliki madrasah. Logika ini semakin menyengsarakan guru swasta, karena hampir semua madrasah swasta mengalami nasib serupa; yaikni jumlah siswa sangat sedikit, perkelas hanya ada 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) siswa bahkan rata-rata di bawah 20 siswa. Sedangkan beban operasional semua sekolah sama; baik jumlah siswa banyak maupun sedikit.

Logika dana BOS yang mengacu pada jumlah siswa, juga tidak pernah nyambung dengan peningkatan kualitas guru. Karena logika realitas ini tidak diakomodasi oleh dana BOS, yaitu: madrasah yang jumlah siswanya sedikit bisa dipastikan karena kualitasnya rendah. Kualitas rendah terjadi karena kualitas guru dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Kondisi ini banyak terjadi karena kesejahteraan guru yang juga sangat rendah.

Dengan demikian, siklus rendahnya kualitas madrasah dan guru-guru swasta seperti dipelihara oleh logika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Meskipun demikian, adanya dana BOS sudah banyak membantu operasional madrasah dibandingkan dengan sebelum adanya BOS. Namun, hemat peneliti keberadaan BOS ini akan semakin baik kalau logika dana BOS tidak berdasarkan jumlah siswa, tetapi mengarah pada pemberdayaan sekolah yang berorientasi pada kualitas.

3. Keterbatasan Fasilitas

Terakhir yang menjadi faktor kesulitan implementasi K-13 di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan adalah keterbatasan fasilitas, terutama di madrasah swasta. Minimnya fasilitas ini yang paling fundamental adalah ketersediaan sumber belajar. Beberapa objek penelitian ini, seperti MI As-Salafiyah Sumber Duko Pakong tidak memiliki buku pegangan siswa pada mapel Bahasa Arab. begitu juga di MI Islamiyah 1 Blumbungan Larangan. Sehingga, materi bahasa Arab harus dituliskan ke papan tulis dahulu baru diajarkan, padahal menulis materi ke papan tulis itu memutuhkan waktu yang agak lama sehingga mengurangi durasi yang semestinya dipakai guru untuk pembentukan kompetensi.

Selain itu, fasilitas lain seperti alat peraga dan media pembelajaran khusus bahasa Arab juga tidak ditemukan di madrasah-madrasah ibtidaiyah objek penelitian ini.

D. Dampak Kesulitan Implementasi K-13 Pada Siswa

Lalu apa dampak dari kesulitan implementasi K-13 ini pada siswa? Pertanyaan ini sesungguhnya sudah dapat terjawab dengan sendirinya dari paparan di atas. Namun untuk mempertegas kondisi riil siswa atas kendala implementasi K-13 yang terjadi di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, perlu juga peneliti sampaikan di sini. Paparan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang peneliti sebutkan dalam Bab I penelitian ini.

Dampak dari kesulitan implementasi K-13 kepada siswa itu dapat dibedakan dalam dua aspek: (1) proses pembelajaran, dan (2) hasil belajar.

1. Proses Pembelajaran

Pada aspek ini, siswa tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh proses pembelajaran yang baik. Implementasi K-13 yang tidak utuh, bukan hanya tidak membawa siswa mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga menjadikan siswa dalam persimpangan. Maksud dari “dalam persimpangan” di sini, siswa diperlakukan setengah hati dalam memperlakukan siswa; antara sebagai objek dan sebagai subjek dalam pembelajaran.

Siswa sebagai objek manakala guru mengajarkan bahasa Arab dengan metode ceramah sebagaimana ditemukan di MIN 1 Pamekasan, hal ini akan berbeda manakala guru menggunakan metode Role Playing misalnya, di mana siswa berperan sebagai subjek dalam pembelajaran bahasa Arab. Maka memperlakukan siswa sebagai objek murni dalam pembelajaran bahasa Arab hanya akan menjauhkan siswa dari pembentukan kompetensi bahasa Arab itu sendiri.

Namun kadang, siswa diposisikan sebagai subjek penuh, tanpa desain dan strategi yang mendukung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab. Hal itu terjadi pada MI Al-Djufri yang dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode diskusi. Perlakuan ini, seakan memposisikan siswa madrasah ibtidaiyah layaknya mahasiswa. Padahal dalam pembelajaran bahasa Arab untuk tingkat madrasah ibtidaiyah metode seperti sangat tidak relevan.

Maka, tidak adanya silabus sebagai acuan dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Pamekasan, sebagaimana ditemukan pada MI As Salafiyah Sumber Dukong Pakong, MI Islamiyah 1 Larangan Tokol Tlanakan, dan MIN 1 Pamekasan menjadikan target dan capaian pembelajaran tidak terarah. Sama seperti orang dalam perjalanan yang tujuannya tidak menentu, maka capaian pembelajaran siswa sesungguhnya tidak diketahui sampai di mana posisi capaian dalam proses pembelajaran.

Sementara “keterbatasan guru” dari semua aspeknya, tentu berdampak secara langsung kepada siswa. Kalau ada ungkapan: “sesungguhnya tidak ada siswa bodoh, tetapi yang ada adalah siswa kurang beruntung karena tidak bertemu dengan guru yang baik”, maka sesungguhnya itu terjadi pada siswa-siswa madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan dalam mapel Bahasa Arab. Barangkali, mereka belajar bahasa Arab selama 6 tahun lamanya di madrasah ibtidaiyah, hasilnya akan sama dengan siswa yang belajar 2 bulan secara intensif yang dipandu oleh guru-guru yang baik dan profesional.

2. Hasil Belajar

Pada aspek hasil belajar, tentu saja siswa sangat terkena dampak dari proses belajar yang tidak baik tersebut. Dampak hasil belajar seyogyanya merupakan proses pembentukan kompetensi yang ditandai dengan perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). Jadi, pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan.

Maka hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Arab berarti perubahan kompetensi siswa dalam keterampilan berbahasa Arab; baik keterampilan menyimak (maharatul istima'), keterampilan berbicara (maharatul kalam), keterampilan membaca (maharatul qira'ah), maupun keterampilan menulis (maharatul kitabah). Artinya, dampak perubahan dalam kemahiran berbahasa Arab pada siswa benar-benar terwujud secara nyata dalam tindakan bukan hanya sebatas angka dalam rapor.

Sementara yang terjadi pada siswa madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan adalah sebaliknya. Nilai mereka nampak tinggi dalam rapor, setidaknya sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) madrasah, tetapi perubahan dalam tindakan belum terlihat secara jelas.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pemaparan data dan pembahasannya pada Bab IV di atas, maka kini saatnya peneliti sampaikan simpulan dari hasil penelitian ini. Penyajian kesimpulan ini, akan peneliti sampaikan dalam bentuk poin-poin agar lebih jelas dan dapat dipahami secara utuh sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memotret implementasi kurikulum 2013 (K-13) di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mulyasa dalam bukunya "Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013" dalam empat aspek berikut: (a) bagaimana sekolah merancang pembelajaran efektif dan bermakna, serta dalam mengorganisasikan pembelajaran, (b) bagaimana sekolah memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran, (c) bagaimana sekolah melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter, dan terakhir (d) bagaimana penataan penilaian (evaluasi).
2. Dalam aspek merancang pembelajaran efektif dan bermakna, serta dalam mengorganisasikan pembelajaran, ditemukan bahwa MI Islamiyah I Larangan Tokol kecamatan Tlanakan belum menggunakan K-13 dan tidak memiliki silabus Mapel Bahasa Arab, begitu juga MI As-Salafiyah Sumber Duko Pakong. Bahkan hampir sama dengan madrasah swasta, kondisi MIN 1 Konang Kecamatan Galis Pamekasan dalam perencanaan pembelajaran Bahasa Arab tidak jauh berbeda karena meskipun sudah mempunyai silabus tapi masih dalam bentuk file belum berupa *print out* formal yang disahkan oleh kepala madrasah.
3. Dalam hal pelaksanaan pembelajaran ditemukan bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah dalam menerapkan pembelajaran bahasa Arab belum mampu mengoptimalkan masyarakat, lingkungan dan media termasuk juga penggunaan jejaring internet dalam praktik pembelajaran. Ini terjadi hampir di semua madrasah, alasan yang diungkapkan oleh madrasah selalu sama "keterbatasan fasilitas dan dana".

4. Bahwa guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan perlu pembinaan dan peningkatan kualitas diri dalam memahami konsep K-13 secara utuh dan komprehensif.
5. Bahwa madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan ditemukan belum memaksimalkan konsep K-13 dalam mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar.
6. Bahwa kebijakan Kepala Madrasah, Kelompok Kerja Madrasah (KKM), dan seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Kabupaten Pamekasan berperan sangat strategis dalam implementasi K-13 secara maksimal di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan.
7. Bahwa belum ditemukan penggunaan pendekatan andragogik, saintifik, dan *active learning* yang semestinya diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan.
8. Bahwa penataan penilaian di madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan masih menggunakan pola lama yang bertumpu pada nilai kognitif dan masih belum memaksimalkan penilaian bidang karakter secara intensif.
9. Ada beberapa faktor penyebab kesulitan implementasi K-13 di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pamekasan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Secara umum ada tiga faktor, yaitu: Kebijakan Madrasah dan Pemerintah, Keterbatasan Guru, dan Keterbatasan Fasilitas. Adapun dampak dari kesulitan implementasi K-13 kepada siswa, dapat dibedakan dalam dua aspek: (1) proses pembelajaran, dan (2) hasil belajar.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah B. Uno, & Nurdin Mohamad. (2013). *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy, J. M. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mukminan. (t.t.). *Implementasi Kurikulum 2013*.
- Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik. (2008). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, Cet. II*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013. (t.t.).
- PMA Nomor 0912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013. (t.t.).
- Rakyat, I. M. P. (1973). *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973*. Departemen Penerangan, Republik Indonesia.
- Sugiono, D. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.